

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perlu penulis tambahkan bahwa dari 45 Responden yang mengembalikan lembar kuesioer hanya 42 orang, namun karena *purpose sampling* maka jumlah tersebut tetap memenuhi syarat untuk penulis lakukan pengolahan data.

A. Faktor terjadinya Penolakan Masyarakat Pribumi pada Kepemimpinan Pendatang Pada Pilkada Kalimantan Utara

Dibawah ini penulis paparkan analisis mengenai faktor yang terjadinya penolakan sebagai berikut :

1. Analisis Perebutan Kekuasaan

Untuk melihat keberadaan perebutan kekuasaan dalam pemilukada serentak tahun 2015, penulis sampaikan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pendapat responden tentang Perebutan Kekuasaan memakai *Coercive Power* (Paksaan) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015

No	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Tinggi	4	09%
2	Tinggi	9	21%
3	Biasa Saja	23	54%
4	Rendah	4	09%
5	Sangat Rendah	2	04%

Jumlah	42	100%
--------	----	------

Sumber: Hasil Penelitian Penulis tahun 2018

Tabel 3.1 tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan paksaan hanya sebanyak 54% yang mengatakan biasa saja artinya adalah munculnya kemarahan sesudah penghitungan suara, karena mereka yang merasa menang ternyata malahan kalah. Sedangkan mereka yang merasa kalah malahan tidak ada tetapi malahan berpesta pora dan menyakitkan hati lawan politiknya.

Ada 0,9% yang mengatakan bahwa kekuatan paksaan sangat tinggi, kemudian 21% tinggi sebaliknya 0,9% mengatakan rendah dan 0,4% sangat rendah.

Responden penulis menyatakan dalam wawancara tertulis sebagai berikut :

“Karena Kalimantan Utara merupakan provinsi baru dan perdana melaksanakan pilkada menjadi sangat wajar ketika Euforia Partai Politik menjadi sangat luas”

Hal ini diungkapkan oleh Staff Bawaslu yang melihat secara langsung kejadian tersebut dan penulis mengatakan bahwa di Kalimantan Utara partai politik sangat banyak mengikuti pilkada pada tahun ini, maka itu disebabkan wajar adanya kegembiraan yang sangat berlebihan.

Selanjutnya narasumber lain mengatakan bahwa :

“Dalam Pemilukada serentak Kalimantan Utara tahun 2015 unsur paksaannya memang ada tapi tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu berdampak besar dalam mempengaruhi pilihan”

Hal ini diungkapkan oleh Pendukung nomer 1 dari partai politik dan penulis mengatakan bahwa tidak terlihatnya paksaan dalam pemilihan calon tersebut melainkan mengikuti pilihan sendiri, namun ada sedikit unsur paksaan tidak mempengaruhi yang berlebihan.

Narasumber dari pihak pendukung nomer 2 dari masyarakat pendukung mengatakan bahwa :

“Biasa saja, karena masyarakat tidak dipaksa tetapi menyadari suku dan agama pemimpin sehingga memilih sesuai ras dan agama masing-masing”

“Karena masing-masing pasangan calon memiliki kekuatan pendukung karena terdapat putera daerah entah sebagai calon kepala daerah maupun wakilnya”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari masyarakat pendukung dan penulis mengatakan bahwa terdapat tim sukses dari kedua pasangan calon tersebut yang bisa menguatkan pilihan, dan juga terdapat putera daerah sebagai pasangan calon yang artinya banyak pendukung.

Narasumber lainnya dari Kapolres yang melihat secara langsung kejadian tersebut mengatakan bahwa :

“Karena masing-masing pemilih/partai pendukung berhak memilih dengan hak suara yang dimiliki tanpa paksaan oleh pihak manapun”

“Melihat antusias para calon dari berbagai golongan sampai ada anak muda yang mendaftar jadi caleg di usia dini

menunjukkan tujuan partai pendukung ini hendak membangun Kalimantan Utara dengan semangat pemuda”

“Tidak paksaan, kebanyakan karakter masyarakat di Kalimantan Utara masih mementingkan suku”

Pendapat tersebut diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dan penulis mengatakan bahwa hal ini sudah sering terjadi diwilayah Kalimantan Utara, adanya kepentingan sendiri.

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung dan mengatakan bahwa :

“Untuk keterlibatan dan keaktifan partai pendukung pada pemilu 2015 Provinsi Kalimantan Utara tidak terlalu aktif memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, mereka hanya aktif dalam kampanye calegnya saja”

Hal ini diungkapkan oleh staff Bawaslu bahwa:

“Karena pemilu merupakan kedaulatan NKRI dan merupakan pemenuhan hak asasi manusia dibidang politik, sebab itu kesadaran mereka untuk menyalurkan aspirasi kepala calon”

Hal ini diungkapkan oleh SATPOL-PP yang melihat secara langsung dari kejadian tersebut mengatakan bahwa :

“Cukup tinggi, dikarenakan setiap partai politik berkeinginan para kandidat Cagub dan Cawagub yang didukung tersebut bisa menjadi kepala daerah”

Hal ini diungkapkan oleh pemerintah yang secara langsung melihat kejadian tersebut mengatakan bahwa :

“Karena tidak bisa memaksa orang lain mengikuti kemauan kita dengan cara memaksa orang lain”

“Karena sebagian besar partai politik masih menganut hukum demokrasi”

Tabel 3.2

Pendapat responden tentang Perebutan Kekuasaan memakai *Reward*

Power (Pemberiaan) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015

No	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Tinggi	7	16%
2	Tinggi	16	38%
3	Biasa Saja	10	23%
4	Rendah	7	16%
5	Sangat Rendah	2	04%
Jumlah		42	100%

Sumber: Hasil Penelitian Penulis tahun 2018

Tabel 3.2 tersebut diatas menunjukkan bahwa 38% responden menyatakan bahwa bagi-bagi hadiah berbentuk uang atau barang cukup tinggi bahkan 16% menyatakan sangat tinggi dengan demi menunjukan kelompok yang memilih kelompok tertentu, pilihannya adalah pemberian, namun pada kesempatan lain ada responden 16% menyatakan bahwa pemberian adalah rendah. Apakah yang berkata demikian menunjukan untuk maksud menutupi atau tidak mendapat pemberian apapun.

Responden penulis menyatakan dalam wawancara tertulis sebagai berikut :

“Pemilikada serentak di Kaltara umumnya tinggi dalam memberikan uang, karena sudah bisa dibilang termasuk dalam budaya pemilu”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik dan penulis mengatakan bahwa hal ini sudah biasa terjadi dalam budaya pemilu yang mengakibatkan kecurangan. Hal ini selalu terjadi ketika adanya pemilu.

Hal ini diungkapkan oleh pemerintah yang melihat secara langsung kejadian tersebut mengatakan bahwa :

“Tidak ada money pada saat akan dilaksanakan pilukada”

Dimana maksud dalam hal ini, narasumber tidak mendapatkan uang ketika dilakukannya kampanye, maupun paksaan untuk memilih pasangan calon tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung bahwa :

“Walaupun saya tidak begitu mengerti mengenai kampanye dengan memberikan uang yang sudah menjadi budaya politik yang tidak sehat. Karena apa? Karena mereka memberi uang untuk suara mereka kepada sahabat keluarga mereka bukan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan uang dan kepada masyarakat itu mereka hanya memberi janji palsu”

“Biasa terjadi pemberian uang dalam masa kampanye, guna untuk bisa memilih satu paslon tersebut”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung bahwa :

“Dalam pemberian ke setiap masyarakat sangat tinggi, namun bukan dalam bentuk tunai akan tetapi dalam bentuk barang yang diberikan kepada masyarakat”

Hal ini diungkapkan oleh staff bawaslu yang mengatakan bahwa :

“Karena dalam Undang-Undang pilkada yang kemarin tidak ada regulasi yang mengatur terkait masalah money politic”

“Mungkin ada yang melakukan praktik money politic, tapi masyarakat tidak teredukasi dalam pendidikan politik, jadi masyarakat tidak berani melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Sudah menjadi hal yang biasa disetiap pelaksanaan pemilu pasti ada pemberi dan penerima baik dalam bentuk uang ataupun barang dan sebagainya”

“Pemberi dan penerima itu pasti ada dapat dikata tiap-tiap ada pemilihan namun tidak merugikan karena memang biasa terjadi”

Hal ini diungkapkan oleh SATPOL-PP yang melihat secara langsung kejadian tersebut mengatakan bahwa :

“Sangat tinggi, banyak dari masyarakat yang diberikan uang untuk dapat mendukung partai tersebut bakal maju dipemilihan dari cara tersebut banyak masyarakat yang tergiur akan hal tersebut”

Tabel 3.3

Pendapat responden tentang Perebutan Kekuasaan memakai *Legitimate Power* (Keabsahan) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015

No	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Tinggi	3	07%
2	Tinggi	16	38%
3	Biasa Saja	21	0,5%
4	Rendah	2	04%
5	Sangat Rendah	0	0%
Jumlah		42	100%

Sumber: Hasil Penelitian Penulis tahun 2018

Tabel 3.3 tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan keabsahan sebanyak 0,5% yang mengatakan biasa saja artinya adalah dalam keabsahan dalam pemilukada tersebut para kandidat sudah sah persyaratan dalam menjadi calon dari pemilu. Namun ada juga responden sebanyak 38% menyatakan tinggi dalam kekuatan keabsahan tersebut. Dan juga menyatakan rendah hanya 04% artinya mengatakan bahwa tidak sah dalam mengikuti pemilu tersebut, kemudian adapun responden menyatakan sangat tinggi 07% dalam tingkat keabsahan tersebut.

Responden penulis menyatakan dalam wawancara tertulis sebagai berikut :

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik mengatakan bahwa :

“Semua itu dilihat dari hasil penghitungan suara”

“Karena keabsahan dilihat dari hasil penghitungan suara yang sudah dikumpulkan”

Hal ini diungkapkan oleh staff Bawaslu yang mengatakan bahwa :

“Karena tanpa keabsahan itu tidak bisa berjalan pilkada”

Penulis mengatakan bahwa jika tidak adanya keabsahan maka calon tidak dapat ditentukan ataupun tidak bisa berjalannya pilkada tersebut.

“Karena telah menjadi syarat utama”

Pendapat ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari masyarakat pendukung mengatakan bahwa :

“Biasa saja, karena keabsahan partai politik dalam mendukung pasangan calonnya semata untuk melihat dari berapa suara yang nantinya akan menjadi tolak ukurnya dari partai politik”

Hal ini diungkapkan oleh staff Bawaslu yang mengatakan bahwa :

“Karena merupakan syarat utama untuk mencalonkan diri dan dokumen persyaratan harus sudah sah karena melalui verifikasi dokumen”

“Dalam keabsahan dukungan terdapat 2 parpol yang sedang ada memiliki masalah dalam informal partai politik mereka yakni Golkar dan PPP (Kalau tidak salah)”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik mengatakan bahwa :

“Sempat digugat ke MK namun diperiksa tidak ada pelanggaran dan saya masih percaya keredabilitas MK”

“Biasa saja, karena banyak dari calon perlu dipersiapkan dalam mengikuti pemilukada di Kalimantan Utara”

“Sah, dikarenakan telah terseleksinya parpol dari masing-masing paslon”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Pendapat saya biasa saja karena yang terjadi pada pemilukada serentak tahun 2015 lalu terdapat kecurangan pada partai pendukung pemilukada”

Hal ini diungkapkan oleh staff Bawaslu yang mengatakan bahwa :

“Sah, sudah sesuai prosedur, mulai dari pendaftaran paslon, bakumdi, antisipasi, gangguan dan dari BAWASLU semua clear”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Karena banyak kecurangan yang diketahui pada saat pemilukada serentak di Kalimantan Utara pada tahun 2015”

“Harus memiliki keabsahan yang bisa dipertanggung jawabkan, dan di Kalimantan Utara tolak ukurnya sangat tinggi”

Tabel 3.4

Pendapat responden tentang Perebutan Kekuasaan memakai *Reverent*

Power (Daya Tarik) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015

No	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Tinggi	9	21%
2	Tinggi	16	38%
3	Biasa Saja	14	33%
4	Rendah	3	07%
5	Sangat Rendah	0	0%
Jumlah		42	100%

Sumber: Hasil Penelitian Penulis tahun 2018

Tabel 3.4 tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan daya tarik pasangan calon sebanyak 07% menyatakan rendah, sedangkan yang menyatakan biasa saja adalah sebanyak 33% artinya tidak ada tertarik dalam pasangan calon tersebut. Kemudian yang menyatakan daya tariknya tinggi sebanyak 38% artinya responden kebanyakan menyatakan daya tarik tinggi. Dan adapula yang menyatakan sangat tinggi sebanyak 21% dalam tingkatan daya tarik tersebut.

Responden penulis menyatakan dalam wawancara tertulis sebagai berikut :

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Karena hampir keseluruhan partai politik mendukung karena kepentingan”

Hal ini diungkapkan oleh kapolres yang melihat secara langsung kejadian tersebut dan mengatakan bahwa :

“Cukup tinggi, apalagi antar pasangan kepala daerah memiliki visi dan misi dari setiap partai politik itu”

“Karena visi dan misi atau program yang ditawarkan”

Penulis berkata bahwa ketertarikan dalam pemilihan pasangan calon tersebut karena visi dan misi mereka yang dapat menguatkan masyarakat Kalimantan Utara.

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Sangat tinggi, contohnya mendistribusikan logistik di Kabupaten Bulungan karena banyak wilayah di Kalimantan Utara yang hanya bisa dijangkau lewat transportasi udara dan sungai”

Hal ini diungkapkan oleh pemerintah yang melihat secara langsung kejadian tersebut dan mengatakan bahwa :

“Daya tarik dalam pemilukada ini lumayan baik, dibuktikan dengan obrolan-obrolan dimasyarakat terhadap pemilu”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Karena masyarakat lebih mengenal pasangan calon selain pribumi”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Sangat tinggi, dibuktikan dengan antusiasme masyarakat dari pedalaman untuk bisa merayakan pesta demokrasi pertama di provinsi Kalimantan Utara”

Tabel 3.5

Pendapat responden tentang Perebutan Kekuasaan memakai *Expert Power* (Keahlian) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015

No	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Tinggi	6	14%
2	Tinggi	15	35%
3	Biasa Saja	18	42%
4	Rendah	3	07%
5	Sangat Rendah	0	0%
Jumlah		42	100%

Sumber: Hasil Penelitian Penulis tahun 2018

Tabel 3.5 tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan keahlian mengatakan rendah sebanyak 07% artinya tidak memiliki keahlian dalam menjadi calon tersebut, selanjutnya yang menyatakan

tinggi sebanyak 35% artinya banyak yang mengatakan tinggi dalam ahlinya. Dan yang menyatakan biasa saja sebanyak 42% berartikan kebanyakan keahliannya hanya biasa saja dan tidak terlihat memiliki keahlian. Dan kemudian yang menyatakan sangat tinggi hanya sebanyak 14% dalam tingkat keahlian tersebut.

Responden penulis menyatakan dalam wawancara tertulis sebagai berikut :

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Animo masyarakat pendukung sudah pintar dan tidak mau dibodohi”

“Tentunya setiap pasangan harus memiliki kemampuan dan keahlian untuk meyakinkan para pendukung partai dan terlebih untuk masyarakat”

Hal ini diungkapkan oleh staff Bawaslu dan penulis mengatakan bahwa pasangan calon tersebut harus ada kemampuan dibidang politik kuat maupun sangat luas yang dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat, agar bisa memimpin daerah Kalimantan Utara.

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Tentu saja tinggi disisikan pemilukada diadakan untuk melihat bagaimana keahlian serta kemampuan calon kandidat dalam menjalankan tugasnya nanti”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Karena masing-masing calon sudah memiliki pengalaman didunia pemerintahan atau birokrasi”

“Karena kedua calon tersebut orang berpengalaman dalam politik maupun pemerintahan”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Karena keahlian pemimpin sangat penting untuk membangun suatu daerah”

“Tinggi, karena keahlian untuk memimpin masyarakat atau suatu daerah sangat penting”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Tinggi, karena dari calon pemilukada memiliki bidang masing-masing dan mempunyai pendidikan yang tinggi yang mampu memimpin Kalimantan Utara untuk terus berkembang dan maju menjadi kota yang besar”

Hal ini diungkapkan oleh pemerintah yang melihat secara langsung kejadian tersebut dan mengatakan bahwa :

“Karena dua pasang calon mempunyai basic, keilmuwan dan pengalaman dibidang pemerintahan”

“Dalam berpolitik lebih banyak karena pengalaman”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Cukup tinggi, karena partai politik mampu mengajak konstuennya untuk dapat memilih pasangan kepala daerah yang diusungnya”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Karena kurangnya menguasai program apa yang akan direncanakan”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Karena dari salah satu sudah berpengalaman menjadi kepala daerah. Yaitu walikota Tarakan”

“Strategi politik yang terukur selama masa kampanye”

2. Analisis terkait Konflik

Untuk melihat keberadaan terkait konflik dalam pemilu pada serentak tahun 2015, penulis sampaikan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6

Pendapat responden tentang konflik yang mengakibatkan perbedaan pendapat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015

No	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Tinggi	13	30%
2	Tinggi	24	57%
3	Biasa Saja	5	11%
4	Rendah	0	0%
5	Sangat Rendah	0	0%
Jumlah		42	100%

Sumber: Hasil Penelitian Penulis tahun 2018

Tabel 3.6 tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan terkait konflik dalam beda pendapat menunjukkan 11% biasa saja

artinya tidak adanya beda pendapat yang mengarahkan dalam pemilu tersebut. Kemudian sangat tinggi sebanyak 30% yang artinya dalam beda pendapat ini sangat berpengaruh dalam pemilu ini, selanjutnya responden paling tinggi sebanyak 57% mengatakan tinggi dalam beda pendapat artinya besar pengaruhnya dalam berbeda pendapat ini. Namun rendah dan sangat rendah tidak ada yang menyatakan dalam berbeda pendapat ini.

Responden penulis menyatakan dalam wawancara tertulis sebagai berikut :

“Karena para pendukung saling memberikan keahlian kandidat tapi tidak tau keahlian para kandidat”

“Karena visi dan misi mereka berbeda”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari masyarakat pendukung dan penulis mengatakan bahwa dari kedua pasangan calon tersebut memiliki visi dan misi maupun strategi yang berbeda untuk menguatkan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara, maka hal wajar ketika adanya perbedaan pendapat dari pasangan calon tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh pemerintah yang melihat secara langsung dan mengatakan bahwa :

“Karena baik putera daerah maupun pendatang masing-masing memiliki pemikiran serta visi misi yang berbeda”

Hal ini diungkapkan oleh staff Bawaslu yang melihat secara langsung dan mengatakan bahwa :

“Sangat memungkinkan setiap kandidatnya memiliki strategi berbeda dalam membangun daerah”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Cukup tinggi, didalam partai politik pendukung itu tentu memiliki strategi dari setiap masing-masing kader yang ingin ide dan strateginya digunakan dalam mempromosikan kepala daerah yang diusung”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Karena belum terbiasa dengan perbedaan”

“Karena visi dan misi dan program berbeda”

“Terbukti dari kerusuhan yang diinisiasi oleh salah satu paslon”

Hal ini diungkapkan oleh kapolres yang melihat secara langsung kejadian tersebut dan mengatakan bahwa :

“Perbedaan pendapat inilah yang mengakibatkan konflik”

“Hal yang biasa perbedaan pendapat didalam pemilu”

Hal ini diungkapkan oleh staff Bawaslu yang melihat secara langsung kejadian tersebut dan mengatakan bahwa :

“Karena masing-masing memiliki strategi politik”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Karena tidak menginginkan hal tersebut. Seharusnya tidak seperti itu, orang pribumi harus menjadi kepala daerah sebenarnya pendatang juga bisa menjadi kepala daerah dimana saja walaupun bukan ditempat aslinya”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Didalam parpol pendukung itu tentu memiliki strategi dari setiap masing-masing kader yang ingin ide & strateginya digunakan dalam mempromosikan kepala daerah yang diusung”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Masing-masing individu berhak berpendapat dan menyampaikan hak suaranya. Oleh karena itu di Kalimantan Utara dalam pemilukada 2015 tinggi dalam ukuran berbeda pendapat”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Karena sejalan untuk membangun daerah”

Hal ini diungkapkan oleh pemerintah yang melihat secara langsung dan mengatakan bahwa :

“Perbedaan pendapat pasti ada dan tentunya kita harus menyelesaikan dengan sebaik-baiknya”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Yang namanya partai pendukung pasti ada pro dan kontra tapi itulah demokrasi”

Tabel 3.7

Pendapat responden tentang konflik yang mengakibatkan untung dan rugi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015

No	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Untung	1	02%
2	Untung	2	04%
3	Biasa saja	5	11%

4	Rugi	11	26%
5	Sangat Rugi	23	54%
Jumlah		42	100%

Sumber: Hasil Penelitian Penulis tahun 2018

Tabel 3.7 tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan terkait konflik dalam mengakibatkan untung dan rugi menyatakan sangat rugi sebanyak 54% artinya dalam kejadian tersebut banyak terjadi kerugian berkaitan dengan rusaknya infrastruktur Negara dan banyak mendapatkan kehilangan berkas atau dokumen penting yang ada dikantor tersebut. Hal ini responden nyatakan kebanyakan sangat rugi, kemudian sebanyak 11% menyatakan biasa saja artinya adalah tidak merasakan rugi dan untung, melainkan merasakan biasa saja. Selanjutnya yang menyatakan rugi sebanyak 26% dan 04% menyatakan untung artinya pihak satunya merasakan untung karena apa yang telah dilakukan telah terjadi dan 02% menyatakan sangat untung dalam kerusuhan tersebut.

Responden penulis menyatakan dalam wawancara tertulis sebagai berikut :

“Karena merusak inventaris pemerintah selama kerusuhan”

“Sangat rugi, apalagi jika menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusuhan yang mengakibatkan bangunan rusak parah”

Hal ini diungkapkan oleh kapolres yang melihat secara langsung kejadian tersebut dan penulis mengatakan bahwa hal ini dampak kerugiannya sangat besar ketika terjadi kerusuhan tersebut, dampaknya

yaitu rusaknya fasilitas negara, kerugian negara maupun pribadi yang motornya juga terikut terbakar dalam kejadian tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Karena berkas-berkas keuangan menjadi terbakar dan merusak fasilitas Negara”

Hal ini diungkapkan oleh pemerintah yang melihat secara langsung dan mengatakan bahwa :

“Sangat rugi dikarenakan kerusuhan yang terjadi sangat merugikan sekali dalam pemilukada yang dilaksanakan 2015”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“(Rugi) dikarenakan pemilukada ini mengakibatkan kerusakan dan pembakaran kantor gubernur, kita juga tidak tau seberapa dan yang dikeluarkan dalam merenofasi kantor tersebut”

Hal ini diungkapkan oleh staff Bawaslu yang melihat secara langsung dan mengatakan bahwa :

“Kerusuhan sangat merugikan karena baik prasarana ataupun sarana dapat menjadi korban”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Dikarenakan masyarakat bisa melihat partai politik pendukung yang tidak menerima kekalahan dari lawan pasangan kepala daerah lainnya”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Karena dapat memberikan pelajaran untuk calon pemimpin yang akan datang agar didaerah Kaltara yang bisa memimpin hanya putra daerah”

3. Analisis terkait Identitas

Untuk melihat keberadaan terkait pribumi dalam pemilu pada serentak tahun 2015, penulis sampaikan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8

Pendapat responden tentang identitas yang mengakibatkan kesamaan suku di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015

No	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Tinggi	19	45%
2	Tinggi	11	26%
3	Biasa Saja	9	21%
4	Rendah	3	07%
5	Sangat Rendah	0	0%
Jumlah		42	100%

Sumber: Hasil Penelitian Penulis tahun 2018

Tabel 3.8 tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan terkait identitas yang mengakibatkan kesamaan suku menyatakan 07% rendah karena tidak adanya politik identitas di Provinsi Kalimantan Utara ini, namun 45% menyatakan sangat tinggi artinya

politik identitas terkait kesamaan suku sangat kental adanya dan mengakibatkan kerusuhan. Kemudian adapun 26% menyatakan tinggi. Selanjutnya 21% menyatakan biasa saja artinya di Kalimantan Utara terkait politik identitas tidak bermasalah atau artinya tidak adanya kerusuhan mengakibatkan kecintaan sesama suku.

Responden penulis menyatakan dalam wawancara tertulis sebagai berikut :

Hal ini diungkapkan oleh pemerintah yang melihat secara langsung dan mengatakan bahwa :

“Permasalahan sesama suku biasa saja juga karena kita Indonesia ini banyak macam suku. Tapi kita semua suku ini satu bahasa satu bangsa yaitu Indonesia”

“Sangat tinggi untuk politik identitas di Kaltara”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik dan penulis mengatakan dalam kesamaan suku di Indonesia sangat kental sekali, karena jika adanya pilkada maka masyarakat hanya memilih sesuai dengan sukunya saja, hal ini seharusnya tidak diperbolehkan karena kita hidup di Negara Indonesia yang dijunjung oleh Bhineka Tunggal Ika yang artinya kita sesama Indonesia adalah sama dan tidak adanya perbedaan antara suku maupun lainnya.

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung mengatakan bahwa :

“Karena dalam partai politik saling menjatuhkan tanpa mengenal suku hanya untuk merebut kekuasaan”

“Karena masih sangat menganut paham kebersamaan serta pembelaan terhadap sesama suku”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Perbedaan pendapat itu boleh-boleh saja tapi kalau kecintaan kita kepada suku-suku lain itu wajib, dikarenakan Indonesia dikenal dengan berbeda-beda suku tapi satu begitu juga tentang agama, kita tetap satu Indonesia!”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Cukup tinggi, karena pada saat pemilukada 2015, salah satu pasangan yang notabene dari Kalimantan sehingga kesukuan tentu turut adil dalam pemilihan pasangan kepala daerah itu”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Kerusuhan yang terjadi membawa identitas suku”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Kecintaan sesama suku sangat tinggi di Kaltara karena adat istiadat yang masih sangat kental”

Hal ini diungkapkan oleh staff bawaslu yang mengatakan bahwa :

“Pemilu biasanya melihat calon pemilukada hanya berdasarkan latar belakang dan suku agama yang dianut. Bukan berdasarkan visi dan misi calonnya”

“Banyak pemilu atau partai pemilu pendukung hanya memilih dan terpacu kepada calon tersebut dengan ras atau suku yang dimiliki. Tanpa melihat visi dan misi yang dimiliki”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Masih banyak orang yang ingin memilih hanya melihat suku, tanpa tau bagaimana kinerja yang dipilih”

“Karena semua orang bisa menjadi kepala daerah dimanapun tanpa ada khusus asal dari mana, tapi hanya ada daerah tertentu yang menjadi kepala daerah khusus”

“Karena di Kalimantan Utara masih adanya sifat memilih kepala daerah berdasarkan sukunya saja”

Tabel 3.9

Pendapat responden tentang identitas yang mengakibatkan kesamaan agama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015

No	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Tinggi	17	40%
2	Tinggi	7	16%
3	Biasa Saja	16	38%
4	Rendah	2	04%
5	Sangat Rendah	0	0%
Jumlah		42	100%

Sumber: Hasil Penelitian Penulis tahun 2018

Tabel 3.9 tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan terkait identitas yang mengakibatkan kesamaan agama menyatakan 04% rendah artinya tidak ada isu terkait mengenai agama dalam pemilukada ini, namun

40% mengatakan sangat tinggi dalam hal agama dalam pemilu ini diakibatkan adanya isu-isu yang berkaitan dengan agama seperti memilih sesuai agamanya saja. Kemudian 38% menyatakan tinggi dalam hal agama. Dan 16% menyatakan dalam hal agama biasa saja, tidak adanya isu terkait kesamaan agama tersebut.

Responden penulis menyatakan dalam wawancara tertulis sebagai berikut :

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Karena ada perbedaan agama dari paslon tersebut”

“Biasa saja, karena pemilukada ini jauh dari isu agama”

“Saling hormat-menghormat dan saling menghargai”

“Pemilu jauh dari masalah agama”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Karena di Kalimantan Utara banyaknya tersebar agama, tidak adanya mayoritas agama”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Toleransi para pendukung hubungannya baik antar agama lain dengan antar pemeluknya”

“Tolak ukur dalam kesamaan agama sangat tinggi dikarenakan masyarakat atau partai pendukung lebih banyak melihat dari agama maupun suku”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung dan pendapat penulis mengatakan bahwa dalam kesamaan agama di Kalimantan Utara sangat kental sekali, karena jika adanya pilkada terkadang masyarakat hanya memilih sesuai dengan agamanya saja, hal ini seharusnya tidak diperbolehkan karena kita hidup di Negara Indonesia yang dijunjung oleh Bhineka Tunggal Ika yang artinya kita sesama Indonesia adalah sama dan tidak adanya perbedaan antara agama maupun lainnya.

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat juga menimbang bila memilih tersebut melihat dari agama yang dimiliki”

“Karena dalam sisi permasalahan dalam akidah, tetapi menjunjung tinggi agama”

Hal ini diungkapkan oleh staff Bawaslu yang melihat secara langsung kejadian tersebut dan mengatakan bahwa :

“Sudah biasa dan selama ini tidak ada masalah dengan perbedaan menganut agama”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Karena dalam pemilukada terutama di tahun 2015 tidak terdapat adanya isu agama. Akan tetapi murni dari sisi pengalaman di setiap masing-masing pasangan calon kepala daerah tersebut”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Perbedaan pendapat itu boleh-boleh saja tapi kalau kecintaan kita kepada suku-suku lain itu wajib, dikarenakan Indonesia dikenal dengan

berbeda-beda suku tapi satu begitu juga tentang agama, kita tetap satu Indonesia!”

Tabel 3.10

Pendapat responden tentang identitas yang mengakibatkan kesusaian politik di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015

No	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Tinggi	3	07%
2	Tinggi	22	52%
3	Biasa Saja	11	26%
4	Rendah	5	11%
5	Sangat Rendah	1	02%
Jumlah		42	100%

Sumber: Hasil Penelitian Penulis tahun 2018

Tabel 3.10 tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan terkait identitas yang mengakibatkan kesusaian politik menyatakan 26% biasa saja artinya tidak adanya kesusaian politik dalam pemilukada ini, namun 52% menyatakan tinggi hal ini dikarenakan dari pasangan calon tersebut sudah berpengalaman dalam hal politik, maka tidak ada hal ragu ketika mereka mencalonkan diri. Kemudian 07% menyatakan sangat tinggi. Selanjutnya 02% menyatakan sangat rendah artinya tidak adanya juga kesusaian politik.

Dan 11% menyatakan rendah karena dalam hal ini kesusaian politik di pemilukada tidak terlalu berpengaruh.

Responden penulis menyatakan dalam wawancara tertulis sebagai berikut :

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Karena sudah berpengalaman didunia politik”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Karena memiliki kepentingan politik masing-masing yang berbeda”

“Karena memakai cara sendiri atau strategi masing-masing”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Parpol tentu sangat berperan penting dalam menyokong kepala daerah karena yang meningkatkan elektabilitas baik dari partai maupun perseorangannya”

“Tolak ukur pemilukada dalam kesusaian politik sangat tinggi, karena masing-masing partai berlomba-lomba menggunggulkan calonnya masing-masing”

Hal ini diungkapkan oleh pemerintah dan penulis mengatakan bahwa dalam dunia politik saling menjatuhkan lawan agar bisa menang sendiri, hal ini tidak diperbolehkan terjadi karena akan menyebabkan kekacauan.

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat cenderung berdasarkan sesama suku, dan tidak ada dari politik”

“Sudah sangat dipastikan para pendukung partai dan pasangan harus memiliki kesesuaian politik yang baik untuk kemajuan daerah yang akan dipimpin”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Tentunya setiap pendukung mampu menyesuaikan diri untuk meningkatkan kesesuaian dalam berpolitik”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Kecenderungan masyarakat hanya berdasarkan kesamaan suku, bukan dari politik parpol”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Tolak ukur dalam kesesuaian politik di Kalimantan Utara 2015 biasa saja dikarenakan calon hanya mengagungkan partai yang diikuti”

Hal ini diungkapkan oleh pemerintah yang mengatakan bahwa :

“Dalam berpolitik itu sudah biasa, begitu selesai pilkada aman-aman saja antar pendukung”

Hal ini diungkapkan oleh staff Bawaslu yang mengatakan bahwa :

“Tentunya setiap pendukung mampu menyesuaikan diri untuk meningkatkan kesesuaian dalam berpolitik”

“Karena sudah berpengalaman”

Tabel 3.11

Pendapat responden tentang identitas yang mengakibatkan kesesuaian ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015

No	Tingkat Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Tinggi	4	09%
2	Tinggi	15	35%
3	Biasa Saja	22	52%
4	Rendah	1	02%
5	Sangat Rendah	0	0%
Jumlah		42	100%

Sumber: Hasil Penelitian Penulis tahun 2018

Tabel 3.11 tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan terkait identitas yang mengakibatkan kesusaian ekonomi menyatakan 52% biasa saja artinya tidak adanya isu terkait ekonomi dan sesuai ekonomi. Namun 35% menyatakan tinggi artinya bahwa setiap calon pasangan yang ingin menjadi calon pasti memiliki ekonomi yang kuat dan lancar. Kemudian 09% mengatakan sangat tinggi. Dan 02% menyatakan rendah artinya satu orang berkata kesusaian ekonomi dalam pemilu tidak begitu berpengaruh atau tidak ada kaitannya dalam hal pemilu ini.

Responden penulis menyatakan dalam wawancara tertulis sebagai berikut :

Hal ini diungkapkan oleh pemerintah yang mengatakan bahwa :

“Pemilu yang dilaksanakan tentunya tidak akan mengganggu perekonomian daerah”

“Saya merasakan biasa saja dalam faktor ekonomi, tidak berkaitan dengan pilkada tersebut”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Termasuk dalam kategori biasa saja karena kita alami sekarang dan sebelumnya hanya sedikit perubahan dalam kesesuaian ekonomi atau tidak tersejahterakan”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Tolak ukur dalam kesesuaian ekonomi rendah, karena partai pendukung hanya berjanji tidak mensejahterakan masyarakatnya dalam bidang ekonomi. Hanya mementingkan partai dan diri sendiri”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Dari sisi ekonomi adanya parpol tentu cukup tinggi dikarenakan dapat mengangkat bagi pedagang kecil, percetakan lebih utamanya”

Hal ini diungkapkan oleh staff Bawaslu yang mengatakan bahwa :

“Karena masing-masing calon tersebut menyerahkan LHKPN dan juga melaporkan kepada KPU terkait dengan dana kampanye”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 1 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Sangat tinggi, karena ekonomi yang tinggi dijamin akan memimpin dengan baik”

“Masalah ekonomi tidak begitu berpengaruh di Kaltara”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari partai politik dan penulis mengatakan bahwa dalam hal ekonomi tidak adanya permasalahan yang menyebabkan perekonomian dalam pilkada tersebut, semua bejalan lancar dalam pilkada di Kalimantan Utara ini.

Hal ini diungkapkan oleh pemerintah yang mengatakan bahwa :

“Sudah sesuai dengan kondisi ekonomi daerah”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari masyarakat pendukung yang mengatakan bahwa :

“Karena setiap pendukung ingin membangun perekonomian di setiap daerahnya”

Hal ini diungkapkan oleh pendukung nomer 2 dari partai politik yang mengatakan bahwa :

“Jika mencalonkan jadi pemimpin, sudah pasti memiliki ekonomi yang kuat”

Hal ini diungkapkan oleh pemerintah yang mengatakan bahwa :

“Pemilukada tahun 2015 di Kalimantan Utara, ekonominya baik tidak menurun, tetap stabil dan masyarakat pun tidak menderita biasa-biasa saja”

“Karena ekonomi lancar”

B. Pembahasan

Selanjutnya penulis sampaikan pembahasan sebagai inflikasi dari analisis tersebut dimuka sebagai berikut :

1. Perebutan kekuasaan memakai kekuatan paksaan menyatakan biasa saja, dikarenakan kebanyakan masyarakat memilih sesuai ras dan agama. Tanpa adanya paksaan dari luar untuk memilih pasangan calon. Selanjutnya kekuatan pemberian menyatakan tinggi, dikarenakan sudah menjadi kebiasaan dalam memberikan uang dan hadiah guna untuk dapat memilih calon tersebut. Dan yang memberikan adalah dari tim sukses masing-masing pasangan calon. Kemudian kekuatan keabsahan

menyatakan biasa saja, dikarenakan ketika calon telah berkeinginan untuk mencalonkan diri maka harus mengikuti syarat dan ketika telah dinyatakan SAH, artinya telah berhak mencalonkan diri. Selanjutnya lagi kekuatan dalam daya Tarik menyatakan tinggi dikarenakan banyaknya masyarakat yang tertarik dengan visi dan misi masing-masing dari pasangan calon. Karena visi dan misi yang sangat kuat untuk meyakinkan masyarakat Kalimantan Utara. Dan yang terakhir kekuatan keahlian dinyatakan biasa saja. Karena masing-masing calon sudah memiliki pengalaman dibidang politik maupun birokrasi. Hal ini menyebabkan biasa saja.

2. Konflik yang mengakibatkan beda pendapat menyatakan tinggi karena visi dan misi yang berbeda, strategi yang berbeda untuk memajukan Kalimantan Utara tersebut. Dan terjadinya konflik tersebut karena hal beda pendapat antara tim sukses pasangan calon. Kemudian konflik yang mengakibatkan untung dan rugi dalam pemilu pada tahun 2015 ini menyatakan sangat rugi karena mengakibatkan rusaknya infrastruktur Negara, banyak motor dan juga mobil milik pribadi maupun Negara ikut terbakar. Dan mengalami banyak kerugian, hal ini karena terjadinya demo akibat tidak menerima hasil dari pemungutan suara yang berakhir anarkis.
3. Identitas yang mengakibatkan kesamaan suku menyatakan sangat tinggi dikarenakan dalam pemilu pada ini pemilih hanya memilih berdasarkan sesama suku saja dan begitu juga dengan kesamaan agama hanya

memilih sesuai agama saja dan yang mengakibatkan kesesuaian politik tinggi dikarenakan memiliki pengalaman didunia politik yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam politik tidak ada persahabatan yang abadi,tetapi yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Dan karena suku, ras, golongan, agama, kepercayaan, almamater merupakan kepentingan. Maka suatu ketika akan terbentuk kepentingan satu golongan, inilah yang menjadi penyebab bentrok, karena memiliki nilai yang berbeda. Oleh karena itu jangan menyalahkan orang lain dan kelompok lain. Kemudian yang mengakibatkan kesesuaian ekonomi biasa saja, dikarenakan dalam hal ekonomi berjalan dengan baik, tidak adanya kendala mengenai ekonomi.

4. KPU selama ini belum maksimal untuk mengantantispasi kemungkinan pecahnya konflik, andai kata KPUD mampu memprediksi kemungkinan ke depan maka selayaknya KPUD menceramahkan nasionalisme, karena bagaimanapun pilkada di Kalimantan Utara adalah untuk membangun bangsa dan negara secara utuh dan berkesinambungan maupun menjadi lebih baik.
5. Faktor penolakan pendukung dari massa pribumi karena adanya yang pertama, pendatang tidak mengetahui banyak hal mengenai daerah tersebut. Kedua, bukan dari orang pribumi asli dari Kalimantan Utara sehingga dari pihak pribumi mengatakan tidak diperbolehkan menjadi kepala daerah di Kalimantan Utara. Ketiga, adanya indikasi *money*

politic yang menyebabkan kecurangan dari pilkada di Kalimantan Utara pada tahun 2015.